

## Peran Modal Sosial Masyarakat Penambang Emas dalam Mempertahankan Tambang Ilegal di Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah

### *The Role of Social Capital of Gold Miners on Defending Illegal Mining in Central Sulawesi Forest Park*

Oleh:

**Nur Rizky Amelia<sup>1</sup>, Hariadi Kartodihardjo<sup>2</sup>, Leti Sundawati<sup>2\*</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan, Pascasarjana, IPB. Jl. Raya Dramaga, Bogor 16680, Jawa Barat

<sup>2</sup> Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, IPB. Jl. Raya Dramaga, Bogor 16680, Jawa Barat

\*email: lsundawati@gmail.com

#### ABSTRAK

Pemberian izin kontrak karya pertambangan di dalam kawasan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah kepada perusahaan swasta mengakibatkan adanya perbedaan perspektif antara pemerintah dan masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya tambang ilegal yang dikelola masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik individu dan modal sosial masyarakat penambang dan peranannya dalam konflik dan perlawanan masyarakat dalam mempertahankan tambang Poboya. Riset bersifat eksploratif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diambil melalui wawancara terstruktur kepada 30 penambang dan wawancara bebas kepada ketua adat dan pemerintah lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun modal sosial yang dimiliki masyarakat penambang pada kategori sedang namun dapat mendorong perlawanan masyarakat terhadap upaya penutupan tambang oleh pemerintah. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya *common knowledge* (pemahaman bersama) bahwa tambang merupakan satu-satunya sumber penghasilan mereka. Selain itu, dukungan tokoh adat dan tokoh desa menjadi *symbollic power* (kekuatan simbolik) yang dapat menggerakkan aksi kolektif masyarakat penambang.

**Kata kunci:** taman hutan raya, tambang emas ilegal, modal sosial, konflik, aksi kolektif

#### ABSTRACT

*The approval of mining permits in the area of the Central Sulawesi Forest Park to a private company caused the emerging of illegal mining by the local community. This study aims to identify the characteristics and social capital of local community miners and their role in the conflict and community resistance. This is explorative research using a qualitative approach. Data was collected through a structured interview to 30 miners as respondents and in-depth interviews with various related stakeholders such as tribal leaders and local government. The results showed that although the social capital of the local community miners was relatively moderate, it could encourage community resistance to the government's efforts to close the illegal mining. The results were affected by a common knowledge that mining is the only source of income for the community. Also, the support of tribal leaders and village officers became a symbolic power that could propel the collective actions of the local community miners.*

**Keywords:** forest park, illegal gold mining, social capital, conflict, collective action

## PENDAHULUAN

Modal sosial merupakan kumpulan dari berbagai sumberdaya manusia yang berhubungan dengan meningkatkan kerjasama dalam menguntungkan diri sendiri maupun orang lain (Uphoff 1999). Modal sosial yang dimiliki masyarakat sangat erat hubungannya dengan keberhasilan pengelolaan sumber daya alam (Nurrochmat et al. 2016; Pranadji 2016). Dalam pengelolaan sumberdaya alam secara lestari modal sosial dipercaya dapat mendorong aksi kolektif (Ostrom 1994; Ray dan Bijarnia 2007). Modal sosial dapat mempermudah akses informasi bagi kelompok masyarakat, menjadi media *power sharing* (Lesser 2000), dapat menghubungkan masyarakat dengan kelompok yang lebih tinggi (Gorriz-Mifsud et al. 2017), mencegah dan menyelesaikan konflik dalam kelompok (Jennings dan Sanchez-Pages 2017; Uphoff 1999), dan meningkatkan kelestarian hutan (Ekawati dan Nurrochmat 2014). Oleh karena itu modal sosial berupa kepercayaan, norma, jaringan dapat memperbaiki hubungan masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi (Putnam et al. 1994). Terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa modal sosial saja ternyata tidak cukup untuk mendorong aksi kolektif (Ishihara dan Pascual 2009; Suharti et al. 2016). Kelompok masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi tidak selalu dapat bersama-sama melakukan aksi kolektif (Ishihara dan Pascual 2009). Terdapat faktor lain yang dapat menggerakkan dan mendorong masyarakat untuk melakukan aksi bersama.

Aksi kolektif yang dilakukan masyarakat Poboya diakibatkan oleh pengukuhan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah (Tahura Sulteng) yang awalnya bernama Tahura Palu berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.461/Kpts - II/1995. Pengukuhan Tahura Sulteng menyebabkan adanya perbedaan perspektif antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan yang memunculkan konflik antara kedua pihak tersebut. Pengukuhan ini membatasi ruang gerak masyarakat yang tinggal di Poboya, dimana wilayah Poboya masuk ke dalam kawasan Tahura. Masyarakat adat kaili sudah mendiami Poboya sejak 1901 dan menjadikan hutan sebagai sumber pemenuhan hidup seperti mengambil rotan, bertani kemiri dan memetik sayur dalam rangka pemenuhan hidup sehari-hari. Setelah pengukuhan Tahura Sulteng, pemerintah kemudian menerbitkan izin kontrak karya kepada PT. Citra Palu Mineral (CPM) pada tahun 1997 untuk melakukan penambangan emas di kawasan Tahura Sulteng. Pemberian izin eksplorasi kepada perusahaan di kawasan Tahura Sulteng memicu masyarakat asli Poboya menuntut pemberian hak yang sama (Zainuddin et al. 2012).

Pemberian izin pertambangan kepada perusahaan mengakibatkan munculnya tambang ilegal yang dikelola oleh masyarakat Poboya dan kemudian juga oleh para pendatang yang diberi ijin oleh ketua adat Poboya. Dengan adanya tambang ilegal masyarakat mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi tetapi mengakibatkan kerusakan secara ekologi dan menghilangkan nilai-nilai dari kearifan lokal. Hilangnya nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat mampu merubah cara dan tata kelola terhadap sumber daya di dalam Tahura Sulteng yang pada awalnya kekuatan yang dimiliki masyarakat digunakan untuk menjaga sumber daya alam berubah menjadi persaingan dalam mengeksploitasi sumber daya alam (Tishaeni 2010; Zainuddin et al. 2012). Masyarakat lebih mementingkan keuntungan secara ekonomi yang didapat dari pemberian izin dan sewa tanah yang dimiliki, retribusi keluar masuk areal, serta kesepakatan kerja bagi masyarakat lokal dalam aktivitas pertambangan (Lahandu 2007; Zainuddin et al. 2012). Hal ini kemudian mengakibatkan kerusakan ekologi berupa pencemaran air sungai maupun air tanah, walaupun belum sampai pada taraf pencemaran berat. Status mutu air sungai Poboya berada pada kelas B atau tercemar ringan (Sartika 2015). Pertambangan juga mengancam kesehatan masyarakat Poboya, warga kota Palu dan sekitarnya karena terkena paparan merkuri akibat menghirup uap limbah pertambangan (Nakazawa et al. 2016).

Masalah yang terjadi akibat adanya pertambangan ini perlu diselesaikan bersama-sama dengan tetap memperhatikan keberlangsungan ekologi serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian terkait peran modal sosial dalam mendorong aksi kolektif masyarakat penting untuk menjelaskan tentang karakteristik individu, tingkatan modal sosial, aksi perlawanan serta hubungan antara modal sosial dan faktor pendukung modal sosial dengan perlawanan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di tambang Poboya yang terletak di dalam kawasan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa areal tersebut merupakan kawasan Tahura Sulteng tetapi telah beralih fungsi menjadi pertambangan emas. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan September 2018. Data dikumpulkan melalui kajian literatur, pengamatan partisipatif, wawancara terstruktur kepada 30 orang dengan alasan sudah dapat memenuhi informasi yang dibutuhkan, serta wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan informan kunci yang memiliki keterlibatan dengan tambang. Pemilihan responden penambang dan informan kunci dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Responden yang dipilih merupakan masyarakat yang berhubungan aktif dengan kegiatan penambangan di kawasan Poboya. Informan kunci berjumlah 12 orang terdiri dari tokoh masyarakat, kepala desa, UPT Tahura Sulteng, Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng, Dinas Energi dan Sumber Daya mineral, PT Palu Citra Mineral, akademisi, LSM Jatam.

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik individu, tingkatan modal sosial, aksi perlawanan, hubungan antara modal sosial dengan konflik dan perlawanan masyarakat serta menggali informasi tentang faktor selain modal sosial yang mendorong aksi kolektif berupa proses tercapainya pemahaman bersama (*common knowledge*) serta pihak yang memiliki kekuatan (*symbolic power*) dalam mempengaruhi *common knowledge* tersebut. Perlawanan penambang dianalisis menggunakan teori perlawanan Scott (1993) yang dibagi menjadi tiga oleh Cahyono (2012) yaitu aksi perlawanan diam-diam atau terselubung, aksi perlawanan konfrontatif dan aksi perlawanan yang negosiatif/kolaboratif. Analisis modal sosial masyarakat di tambang Poboya menggunakan konsep modal sosial Uphoff (1999) yaitu segala hal yang ada hubungannya dengan kerjasama masyarakat untuk mencapai suatu tujuan dengan melihat unsur-unsur berupa jaringan, norma, kepercayaan dan kepedulian (Tabel 1).

**Tabel 1.** Indikator dan kategori yang digunakan untuk mengukur modal sosial di Tambang Poboya.

Variabel	Indikator	Kategori*
Kepercayaan	• Kepercayaan yang terbangun antara sesama masyarakat	• Minimum
	• Kepercayaan yang terbangun antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan	• Rendah
	• Kepercayaan dengan tokoh masyarakat	• Sedang
	• Kepercayaan dengan aparat Kepolisian	• Tinggi
	• Kepercayaan dengan pihak luar (LSM/swasta)	
Nilai dan Norma	• Aturan <i>formal</i> tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (Tahura)	• Minimum
		• Rendah
	• Aturan <i>non-formal</i> tentang pengelolaan Tahura yang dibuat oleh masyarakat adat Kaili	• Sedang
		• Tinggi

Variabel	Indikator	Kategori*
Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan seperti apa yang dibangun antara sesama masyarakat dalam pengelolaan Tambang</li> <li>• Hubungan masyarakat yang dibangun dengan pemerintah dan perusahaan sebagai aktor eksternal dalam pengelolaan Tahura</li> <li>• Organisasi yang diikuti</li> <li>• Kerelaan membangun jaringan</li> <li>• Partisipasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum</li> <li>• Rendah</li> <li>• Sedang</li> <li>• Tinggi</li> </ul>
Kepedulian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepedulian dengan sesama masyarakat</li> <li>• Kepedulian terhadap lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum</li> <li>• Rendah</li> <li>• Sedang</li> <li>• Tinggi</li> </ul>

Keterangan: \* = klasifikasi tingkatan modal sosial berdasarkan Uphoff (1999).

Variabel dan indikator pada Tabel 1 dan 2 kemudian diturunkan ke dalam kuisioner. Hasil dari kuisioner tersebut kemudian digunakan untuk menentukan *skoring* masing-masing unsur karakteristik dan modal sosial. Karakteristik modal sosial di *skoring* dengan menggunakan angka 0 dan 1. *Skoring* didapatkan dengan cara mengalikan total jumlah responden dengan yang memilih jawaban pilihan angka *skoring*. Setelah itu dilakukan penjumlahan hasil dari *skoring* tersebut yang kemudian dibagi dengan jumlah seluruh responden. Hasil dari penjumlahan dan pembagian ini akan menghasilkan tingkat modal sosial dari masing-masing unsur modal sosial. Setelah menghitung masing-masing skor dari kepercayaan, jaringan, norma dan kepedulian kemudian dilakukan penghitungan lebar kelas untuk mendeskripsikan karakteristik individu, modal sosial dan tingkat modal sosial menurut Adalina et al. (2015) dilakukan dengan persamaan selang nilai, yaitu:

$$\text{Lebar Kelas} = \frac{\text{Selisih Nilai Terbesar dengan Nilai Terkecil}}{\text{Banyaknya Kelas}}$$

Banyaknya kelas disesuaikan dengan tingkat kategori yang diinginkan. Karakteristik individu dibagi menjadi tiga kelas yaitu rendah, sedang, kuat. Modal sosial dibagi menjadi empat kelas yaitu minimum, rendah, sedang dan tinggi. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa nilai maksimum dari seluruh unsur modal sosial adalah sebesar 68 dan minimum sebesar 17 kemudian dibagi 4 menghasilkan selang kelasnya 13, maka didapatkan skala penilaian untuk tingkatan modal sosial pada penambang Poboya sebagai berikut :

1. Minimum : jumlah rata-rata skor 17–30,
2. Rendah : jumlah rata-rata skor antara 31–43,
3. Sedang : jumlah rata-rata skor 44–56,
4. Tinggi : jumlah rata-rata skor 57–69.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Modal Sosial Penambang Poboya

Penambang di Poboya didominasi oleh laki-laki dan beragama islam dengan suku yang beragam. Dominasi laki-laki dalam pengelolaan tambang sebesar 73,3% dengan tingkat keragaman suku yang di dominasi oleh suku Kaili Tara sebesar 56,7% dan dominasi agama islam memiliki persentase dengan besaran 96,7%. Berdasarkan Sulismadi dan Sofwani (2011) bahwa keragaman budaya akan mengakibatkan adanya gesekan dalam lingkungan sosial yang akan memberikan potensi konflik apabila tidak diatur secara khusus dalam aturan adat. Masyarakat penambang berada pada tahap umur yang produktif. Responden yang berada pada

umur 13–28 tahun sebesar 20%, 29–44 tahun sebesar 46,7% dan 45–60 tahun sebesar 33,3%. Dalam usia produktif seorang individu akan berusaha memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan cara menambah penghasilan secara maksimal dan kreatif (Adalina et al. 2015). Dengan umur yang produktif dan juga memiliki tanggungan untuk dihidupi maka akan membuat penambang harus mencari uang. Sedangkan masyarakat asli dan masyarakat pendatang hanya bergantung pada tambang semenjak dibukanya tambang. Lama tinggal responden di Poboya > 20 tahun sebesar 50%, 10-20 tahun sebesar 26,7% dan < 10 tahun sebesar 23,3% dari jumlah responden. Sedangkan untuk lama menambang di Poboya > 6 tahun sebesar 76,7%, 3-6 tahun sebesar 13,3% dan < 3 tahun 10% dari jumlah responden. Tingkat pendidikan masyarakat didominasi oleh tingkat pendidikan SD dan SMA serta tidak pernah mengikuti pendidikan non-formal. Rata-rata penambang tidak memiliki ketertarikan untuk meningkatkan kapasitas diri karena adanya keterbatasan dalam faktor ekonomi. Masyarakat lebih memilih mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibandingkan untuk mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kapasitas diri.

Tingkat pendapatan masyarakat berbeda-beda tergantung pada peran, kepemilikan lahan dan modal kerja yang dimiliki oleh masyarakat. Pendapatan penambang berkisar antara Rp 700.000 sampai dengan Rp 60.000.0000. Pendapatan tersebut dapat dikategorikan sangat besar apabila mengacu pada upah minimum regional (UMR) Kota Palu yaitu sebesar Rp 2.400.000 atau artinya masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil bekerja di tambang (Guritno et al. 2014). Hal ini mengakibatkan tingkat migrasi penduduk luar ke Poboya sangatlah besar karena menurut Ge dan Lei (2013) tambang dipercaya dapat berkontribusi dalam meningkatkan penghasilan masyarakat.

Menurut Suharti et al. (2016) kepercayaan dapat dilihat dari hubungan timbal balik dan tolong menolong dalam pergaulan sehari-hari. Kepercayaan masyarakat penambang dalam pergaulan sehari-hari masih menunjukkan arah yang positif. Masyarakat bergaul tanpa memandang suku dan tidak membatasi pergaulan dengan siapapun. Namun masyarakat umumnya hanya mau meminjamkan uang terhadap orang dengan etnis yang sama atau dengan orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan. Sedangkan dengan orang dengan etnis yang berbeda masyarakat tidak percaya sama sekali. Terdapat bentuk kepercayaan yang terlihat lebih menonjol dibanding yang lainnya yaitu kepercayaan yang timbul karena adanya hubungan kerja. Menurut Rinawati (2012) kepercayaan yang timbul akan membuat masyarakat dapat bekerja sama dengan sangat baik dalam mendapatkan tujuan bersama. Dalam hubungan kerja pemberi kerja/kepala kongsi tambang akan meminjamkan uang atau barang kepada masyarakat baik masyarakat asli maupun pendatang yang bekerja di lubang tambang miliknya. Pembayaran dari pinjaman itu akan dipotong dari upah yang didapatkan dari hasil bekerja kepada kepala kongsi.

Masyarakat baik yang berasal dari Poboya maupun pendatang memiliki kepercayaan yang tinggi kepada ketua adat dan aparat desa, karena ketua adat memiliki kewenangan secara adat dalam memberikan ijin penambangan. Selain itu ketua adat bersama aparat desa masih memiliki *power* dan masih dipercaya untuk menegosiasikan tentang keberlangsungan tambang. Kepercayaan yang tinggi terhadap ketua adat dan aparat desa juga diakibatkan karena hubungan keluarga yang dimiliki oleh sebagian penambang. Hal ini kemudian menjadi alasan ketua adat dan aparat desa membiarkan penambangan di Poboya tetap berlangsung.

Masyarakat lebih taat kepada aturan dan norma adat. Sebagai contoh masyarakat mempercayai emas merupakan hal yang gaib, oleh karena itu masyarakat percaya bahwa apabila orang yang bekerja di tambang melakukan hal-hal yang buruk maka mereka tidak akan mendapatkan hasil dari tambang. Sebaliknya masyarakat tidak terlalu patuh dengan aturan tertulis dari pemerintah yang tercermin dari tetap berlanjutnya kegiatan penambangan oleh masyarakat di Tahura Sulteng walaupun sudah berkali-kali diadakan penertiban oleh pemerintah. Masyarakat lebih menaati aturan dan norma adat karena menurut Lawang (2004),

aturan yang dipatuhi bersama terjadi karena ada keuntungan yang didapatkan dari aturan tersebut.

Masyarakat asli Poboya maupun pendatang pada umumnya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Kepedulian terhadap sesama ini ditunjukkan dengan cara saling membantu apabila ada warga yang menggelar pesta pernikahan dan kematian. Kepedulian terhadap sesama juga ditunjukkan dengan cara saling membantu apabila ada orang yang terkena musibah seperti tertimbun didalam lubang. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang terkait dengan keberlangsungan mata pencaharian dan kebutuhan hidup sehari-hari akan dijaga bersama-sama oleh para penambang seperti menjaga kebersihan jalan menuju tambang, menjaga dan memelihara sumber air. Namun kepedulian mereka sangat rendah terhadap dampak lingkungan dari kegiatan penambangan, rehabilitasi hutan dan lahan atau hal-hal diluar kebutuhan sehari-hari dan keberlangsungan mata pencaharian mereka. Isu pencemaran air dan tanah tidak berpengaruh sama sekali terhadap masyarakat karena para penambang belum merasakan secara langsung akibat dari kegiatan penambangan tersebut. Oleh karena itu, kegiatan tambang terus dilakukan walaupun sudah berkali-kali di berhentikan oleh pemerintah daerah.

**Tabel 2.** Tingkat modal sosial penambang Poboya.

No.	Modal Sosial	Skor	Rata-Rata	Max-Min	Kategori
1	Kepercayaan	751	25	36-9	Sedang
2	Jaringan	293	10	16-4	Rendah
3	Norma	169	7	8-2	Sedang
4	Kepedulian	211	6	8-2	Sedang
	Jumlah	1.424	48	68-17	Sedang

Untuk unsur modal sosial dalam bentuk jaringan dianalisis berdasarkan empat variabel yaitu keragaman dan keanggotaan organisasi, partisipasi dalam kelompok, kerelaan membangun jaringan dan kerjasama baik ke dalam kelompok maupun ke luar kelompok. Terdapat dua tipe organisasi yang diikuti oleh responden. Para penambang yang berasal dari Poboya khususnya perempuan umumnya masih mengikuti satu organisasi formal di desa dan satu organisasi informal di tambang. Tipe organisasi yang diikuti oleh penambang berupa organisasi formal dan informal. Organisasi formal yang diikuti oleh penambang Poboya yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pencinta alam, dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Untuk organisasi informal yang diikuti penambang yaitu berupa kongsi. Sedangkan untuk penambang yang berasal dari luar Poboya tidak mengikuti satupun organisasi di desa karena penambang dari luar Poboya umumnya hanya bertujuan untuk bekerja. Rata-rata para penambang hanya menghabiskan waktu untuk bekerja didalam tambang dan tidak mempunyai waktu untuk berorganisasi secara penuh. Kerelaan masyarakat dalam membangun jaringan sosial berada pada tingkat rendah karena masyarakat hanya disibukkan dalam bekerja di tambang. Masyarakat pada umumnya berinteraksi membentuk jaringan hanya pada saat bertemu ditambang dan membangun jaringan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Terdapat satu variabel yang kuat dalam unsur modal sosial jaringan yaitu kerjasama (Tabel 3). Masyarakat memiliki kerjasama yang kuat apabila menyangkut soal tambang. Masyarakat umumnya mudah diajak bekerjasama apabila menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan tambang. Masyarakat secara sukarela bekerjasama, bergotong royong untuk membersihkan jalan menuju ke tambang atau dalam hal lain yang bersangkutan dengan tambang atau dapat dikatakan masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi, kerja sama yang tinggi, kepedulian yang tinggi serta norma internal yang dipatuhi ada kaitanya dengan motif ekonomi.

Tabel 3. Hasil perhitungan unsur jaringan penambang Poboya.

No	Sub Unsur Jaringan	Tingkat	n	%	Skor	Rata-rata	Kriteria
1	Organisasi yang diikuti	1	4	13,3	4	2,0	Rendah
		2	24	80,0	48		
		3	1	3,3	3		
		4	1	3,3	4		
Jumlah			30	100	59		
2	Jumlah keluarga yang ikut	1	13	43,3	13	1,6	Rendah
		2	17	56,7	34		
		3	0	0	0		
		4	0	0	0		
Jumlah				100	47		
3	Kerelaan	1	3	10,0	3	2,2	Rendah
		2	21	70,0	42		
		3	2	6,7	6		
		4	4	13,3	16		
Jumlah				100	67		
4	Kerjasama	1	0	0	0	4,0	Tinggi
		2	0	0	0		
		3	0	0	0		
		4	30	100	120		
Jumlah					120		
Jumlah Kategori					293	9,8/4 = 2,4	Rendah

Secara keseluruhan masyarakat memiliki modal sosial sedang. Dilihat dari pola interaksi dan modal sosial yang dimiliki, masyarakat memiliki tipologi modal sosial mengikat (*bonding*) yaitu tipe modal sosial dengan interaksi yang kuat dan saling percaya antara sesama anggota kelompok yang dituntun oleh nilai dan norma yang disepakati bersama. Masyarakat memiliki ikatan berupa kesamaan kepentingan dan emosi berdasarkan ekonomi serta perasaan senasib sepenenderitaan. Sehingga masyarakat umumnya mudah diajak bekerjasama apabila menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan sumber penghidupan mereka. Hal tersebut sesuai dengan temuan Paramita et al. (2018) yang menyatakan bahwa masyarakat dengan modal sosial mengikat (*bonding*) cenderung bekerja secara internal dan kurang bisa bertoleransi dengan orang luar dan mengutamakan kepentingan kelompok.

### Modal Sosial sebagai Penguat Perlawanan Penambang Poboya

Kegiatan pertambangan oleh masyarakat Poboya di 90% dilakukan pada lahan negara yaitu pada kawasan Tahura Sulteng. Berdasarkan peraturan perundangan kegiatan selain kegiatan kehutanan tidak diperbolehkan di dalam kawasan Tahura. Adanya izin kontrak karya yang diberikan kepada perusahaan swasta untuk melakukan pertambangan di dalam kawasan Tahura Sulteng serta munculnya penemuan butiran emas pada tahun 2008 mendorong munculnya penambangan tanpa izin (peti) yang dilakukan oleh masyarakat baik lokal maupun pendatang. Hal tersebut memicu konflik dan perlawanan masyarakat sebagai bentuk aksi kolektif ketika terjadi penertiban oleh pemerintah. Aksi, bentuk dan strategi perlawanan yang dilakukan penambang Poboya yang telah terjadi disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Bentuk perlawanan, faktor pembentuk dan aksi/ tindakan perlawanan.

No	Bentuk perlawanan	Faktor pembentuk perlawanan	Aksi/ tindakan perlawanan
1	Kolektif tertutup dan Kolektif terbuka (2008-Sekarang)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Masyarakat tidak dilibatkan dalam kegiatan tata batas.</li> <li>2.Masyarakat tidak diberikan akses untuk mengambil HHBK.</li> <li>3.Adanya pemberian KK baru di kawasan Tahura Sulteng.</li> <li>4.Terbitnya SK Gubernur Sulteng Nomor 180/345/Biro Hukum-G.ST/2009 tentang penertiban terpadu Penambangan Tanpa Izin (PETI).</li> <li>5.Terbitnya Peraturan Walikota Palu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pengelolaan Pertambangan.</li> <li>6.Penghentian aktivitas dan penutupan tambang Poboya 23 Desember 2017 oleh POLDA Sulteng.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabaikan peraturan dari pemerintah atau bersikap tidak peduli atas peraturan pemerintah yang melarang penambangan.</li> <li>2. Membicarakan hal-hal yang buruk tentang pemerintah yang dianggap tidak berpihak atau merugikan masyarakat Poboya.</li> <li>3. Berpura-pura mengikuti dan mematuhi dengan tertib penertiban, akan tetapi secara terselubung terus menambang.</li> <li>4. Pembentukan organisasi tahun 2008</li> <li>5. Aksi demonstrasi.</li> <li>6. Okupasi lahan.</li> <li>7. Membangun gerbang masuk ke dalam tambang Poboya dan memblokir Tahura Sulteng untuk masuk ke dalam wilayah konservasi milik mereka.</li> </ol>
2	Kolektif negosiasi/ tawar menawar (2016-Sekarang)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Terbukanya negosiasi melalui kelembagaan adat.</li> <li>2.Adanya upaya pembentukan pokja untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan Tahura.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audiensi dengan pemerintah daerah.</li> <li>2. Negosiasi dengan permintaan di cabutnya SK penertiban pertambangan di Poboya.</li> </ol>

Strategi perlawanan tertutup oleh masyarakat Poboya dilakukan dari awal pembentukan Tahura. Strategi tersebut diwujudkan dalam aksi perlawanan diam-diam berupa mengabaikan peraturan serta membicarakan hal-hal yang buruk tentang pemerintah. Masyarakat bersikap tidak peduli atas peraturan pemerintah yang melarang penambangan atau berpura-pura mengikuti dan mematuhi dengan tertib penertiban, akan tetapi secara terselubung terus menambang. Perlawanan secara terbuka dilakukan masyarakat karena memiliki solidaritas yang tinggi apabila menyangkut tambang. Lembaga adat sebagai pendukung yang kuat pada awal tambang dibuka merupakan salah satu penyebab penambang mampu mengumpulkan kekuatan untuk melakukan perlawanan dengan demonstrasi. Selain demonstrasi masyarakat Poboya juga melakukan perlawanan negosiatif. Masyarakat melakukan negosiasi dalam rangka menggagalkan berbagai usaha pemerintah untuk menutup tambang Poboya.

Perlawanan yang dilakukan masyarakat memunculkan konflik yang sangat besar antara pemerintah versus masyarakat lokal dan masyarakat versus perusahaan. Konflik pertama antara pemerintah dan masyarakat terjadi karena pemerintah menetapkan Desa Poboya sebagai bagian dari kawasan konservasi Tahura Sulteng. Potensi konflik selanjutnya yaitu pemerintah memberikan hak pemanfaatan sumber daya alam kepada perusahaan Citra Palu Mineral (CPM) berupa izin kontrak karya pada tahun 1997. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, izin kontrak karya yang sudah diberikan sebelum tahun 1999 tetap diberlakukan sampai berakhirnya izin kontrak karya tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan, lahan yang diberikan izin untuk eksplorasi memang ada di dalam kawasan Tahura. Tetapi perusahaan mengkonfirmasi tidak akan mengeksplorasi selama kawasan tersebut masih dalam status kawasan Tahura.

Kawasan hutan di Desa Poboya sebelumnya sudah didiami dan dimanfaatkan oleh masyarakat Poboya sehingga dengan adanya penetapan Tahura menyebabkan hak akses masyarakat terhadap sumberdaya alam dan ruang gerak masyarakat dalam mencari



penghidupan semakin terbatas. Zainuddin et al. (2012) mencatat bahwa perbedaan kepentingan pengelolaan Tahura Sulteng disebabkan perbedaan perspektif dalam mengelola sumberdaya alam. Masyarakat memandang Poboya sebagai tanah leluhur yang harus mereka peroleh manfaatnya dan pertahankan sedangkan pengelola Tahura Sulteng memandang bahwa masyarakat merupakan ancaman bagi keberlanjutan Tahura Sulteng.

Karakteristik individu masyarakat yang rata-rata berada dalam usia produktif, pendidikan yang rata-rata hanya sampai SD dan ketertarikan untuk meningkatkan kapasitas diri sangat rendah, menyebabkan tambang menjadi satu-satunya tempat untuk menggantungkan hidup karena tambang memberikan manfaat berupa penghasilan secara cepat dan berlimpah tanpa membutuhkan persyaratan pendidikan tinggi (Adalina et al. 2015). Ketergantungan tinggi terhadap sumberdaya yang dikelola diakibatkan oleh keadaan sosial dan tekanan untuk pemenuhan kebutuhan hidup (Nurrani dan Tabbab 2013), apabila tempat menggantungkan hidup untuk pemenuhan kebutuhan terganggu maka akan memunculkan aksi kolektif untuk memperjuangkan nasib dan hak atas sumberdaya tersebut (Cahyono 2012).

Konflik masyarakat penambang dengan pengelola Tahura Sulteng mengakibatkan ikatan yang dimiliki masyarakat Poboya semakin kuat. Jennings dan Sanchez-Pages (2017) menyatakan bahwa konflik dengan kelompok lain dapat mendorong modal sosial yang dimiliki masyarakat menjadi lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep modal sosial juga mendapatkan perhatian sebagai salah satu modal yang mampu mendorong aksi kolektif dalam pengelolaan sumber daya alam. Aksi kolektif sangat ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki berupa karakteristik masyarakat dan modal sosial-ekonomi yang dimiliki, serta karakter dari lawan yang dihadapi (Cahyono 2012). Karakteristik dan modal sosial masyarakat memiliki hubungan yang menimbulkan kerjasama dalam mendorong aksi kolektif. Terdapat korelasi nyata pada taraf 0,05 antara pekerjaan dengan seluruh unsur modal sosial. Dengan nilai uji chi square sebesar 0,028 untuk kepercayaan, 0,000 untuk jaringan, 0,000 untuk norma dan 0,005 untuk kepedulian. Hal ini karena ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap tambang. Ikatan ini kemudian menimbulkan modal sosial berupa rasa percaya, kerjasama, kepedulian dan taat terhadap aturan tidak tertulis atau aturan adat yang mengatur pengelolaan tambang, sehingga muncul rasa aman, saling mengandalkan dan berani untuk melawan.

Modal sosial ternyata tidak selalu cukup sebagai penguat dan penguat aksi kolektif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam (Ishihara and Pascual 2009; Ostrom 1994). Keputusan untuk terlibat dalam aksi kolektif tidak hanya dipengaruhi modal sosial tetapi dipengaruhi faktor lain yang dapat mengaktifkan modal sosial tersebut yang mana dalam kasus ini memicu perlawanan. Faktor tersebut adalah tindakan yang kompleks dari *common knowledge* dan *symbolic power* (Ishihara dan Pascual 2009, Suharti et al 2016). *Common knowledge yang* merupakan proses mempengaruhi pihak lain sampai tercapainya satu kesepakatan atas sebuah preferensi (Ishihara and Pascual 2009). *Common knowledge yang* dimiliki masyarakat Poboya berupa kesamaan persepsi tentang tambang Poboya merupakan satu-satunya tempat untuk mencari penghidupan, sehingga harus dijaga dari hal-hal yang akan mengancam keberlangsungan tambang Poboya. Untuk mencapai sebuah *common knowledge* diperlukan seorang tokoh yang memiliki kekuatan untuk mendorong masyarakat untuk mengikutinya. Tokoh yang memiliki kekuatan tersebut dapat dikatakan memiliki kekuatan simbolis (*symbolic power*) (Suharti et al. 2016). Ketua adat dan aparat desa Poboya merupakan tokoh yang memiliki *symbolic power*. Ketua adat dan aparat desa masih memiliki power dan masih dipercaya untuk menegosiasikan tentang keberlangsungan tambang. Ketua adat dan aparat desa memiliki relasi dengan pemerintah yang dijadikan tempat untuk mengadu, negosiasi dan meminta perlindungan dalam rangka mempertahankan tambang Poboya.

Alasan lain terbentuknya perlawanan sebagai bentuk aksi kolektif yang dilakukan masyarakat adalah minimnya koordinasi dan monitoring oleh pengelola Tahura Sulteng.

Pengelola Tahura Sulteng hanya mengacu pada *standart operational procedure* (SOP) dalam koordinasi dan monitoring. Hal ini mengakibatkan pengelolaan yang cenderung kaku dan tidak adanya *exit strategy* dalam penyelesaian masalah tambang di dalam Tahura Sulteng (Sulastiyo et al. 2010).

Permasalahan tambang emas di dalam Tahura Sulteng tidak terlepas dari kepentingan politik pemerintah. Dukungan diberikan salah satu petinggi daerah karena Poboya merupakan basis politik salah satu petinggi daerah. Pemerintah daerah juga secara tidak langsung memberikan dukungan dengan mengadakan upacara adat Pora'a Binangga yaitu ritual adat yang diadakan apabila terjadi kekeringan. Menurut salah satu LSM yang diwawancarai upacara adat ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai pembuktian bahwa kabar tercemarnya aliran sungai Poboya oleh bahan kimia sianida (CN<sup>-</sup>) dan merkuri (Hg) tidaklah benar. Pembuktian tersebut tidak sejalan dengan beberapa penelitian bahwa sungai di Poboya mengandung logam tembaga (Cu) yang cukup tinggi (Nuriadi et al. 2013). Resiko kesehatan manusia yang terkena paparan merkuri tidak hanya orang yang bekerja dibidang pengolahan emas tapi juga warga Kota Palu dan sekitarnya terancam kesehatannya bila menghirup uap merkuri dari limbah hasil pertambangan (Nakazawa et al. 2016). Akibat dari menghirup uap merkuri dapat menyebabkan kerusakan pada sel otak manusia (Sarna 2014).

## SIMPULAN

Unsur modal sosial yang paling berpengaruh terhadap perlawanan masyarakat adalah kepercayaan yang tinggi terhadap tokoh masyarakat, kerjasama dan kepedulian yang tinggi terhadap hal-hal yang terkait dengan tambang, serta ada norma internal yang dipatuhi bersama oleh masyarakat. Selain modal sosial terdapat proses untuk meyakinkan masyarakat untuk melakukan perlawanan berupa *common knowledge* yang dilakukan oleh *symbolic power* yang dimiliki ketua adat dan aparat desa. Oleh karena itu perencanaan pengelolaan Tahura Sulawesi Tengah perlu memperhatikan unsur modal sosial, *symbolic power* dan *common knowledge* yang dimiliki masyarakat. Perlu penelitian lebih lanjut tentang alternatif pengganti tambang dalam peningkatan pendapatan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adalina, Y., Nurrochman, D. R., Darusman, D., and Sundawati, L. 2015. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam* 12(2): 105–118. DOI: 10.20886/jphka.2015.12.2.105-118
- Bourdieu, P. 1989. Social Space and Symbolic Power. *Sociological Theory* 7(1): 14–25. DOI: 10.2307/202060
- Cahyono, E. 2012. Aksi Petani dalam Kontestasi Politik Penataan dan Penguasaan Ruang di Kawasan Konservasi Taman Nasional Ujung Kulon-Provinsi Banten. Institut Pertanian Bogor.
- Ekawati, S., and Nurrochmat, D. R. 2014. Hubungan Modal Sosial dengan Pemanfaatan dan Kelestarian Hutan Lindung. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 11(1): 40–53. DOI: 10.20886/jakk.2014.11.1.40-53
- Ge, J., and Lei, Y. 2013. Mining Development, Income Growth and Poverty Alleviation: A Multiplier Decomposition Technique Applied to China. *Resources Policy* 38(3): 278–287. DOI: 10.1016/j.resourpol.2013.05.004
- Gorriz-Mifsud, E., Secco, L., Da Re, R., Pisani, E., and Bonet, J. A. 2017. Structural Social

- Capital and Local-Level Forest Governance: Do They Inter-Relate? A Mushroom Permit Case in Catalonia. *Journal of Environmental Management* Academic Press 188: 364–378. DOI: 10.1016/J.JENVMAN.2016.11.072
- Guritno, D. F. E. R., Wibowo, B. A., and Boesono, H. 2014. Analisis Tingkat Kesejahteraan Nelayan Pancing Ulur (Hand Line) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu Sukabumi Jawa Barat. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology* 3(3): 311–318.
- Ishihara, H., and Pascual, U. 2009. Social Capital in Community Level Environmental Governance: A Critique. *Ecological Economics* 68(5): 1549–1562. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2008.11.003
- Jennings, C., and Sanchez-Pages, S. 2017. Social Capital, Conflict and Welfare. *Journal of Development Economics* 124: 157–167. DOI: 10.1016/j.jdeveco.2016.09.005
- Lahandu, J. 2007. Analisis Kebijakan Pengelolaan Akses Sumberdaya Alam oleh Masyarakat Kaili di Taman Hutan Raya(TAHURA), Sulawesi Tengah. Institut Pertanian Bogor.
- Lawang, R. M. Z. 2004. *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik: Suatu Pengantar*. Universitas Indonesia (FISIP UI) Press.
- Lesser, E. L. 2000. *Knowledge and Social Capital: Foundations and Applications*. Butterworth-Heinemann.
- Nakazawa, K., Nagafuchi, O., Kawakami, T., Inoue, T., Yokota, K., Serikawa, Y., Basir-Cyio, M., and Elvince, R. 2016. Human Health Risk Assessment of Mercury Vapor Around Artisanal Small-Scale Gold Mining Area, Palu city, Central Sulawesi, Indonesia. *Ecotoxicology and Environmental Safety* 124: 155–162. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2015.09.042
- Nuriadi, N., Napitupulu, M., and Rahman, N. 2013. Analisis Logam Tembaga (Cu) pada Buangan Limbah Tromol (TAILING) Pertambangan Poboya. *Jurnal Akademika Kimia* 2(2): 90–96.
- Nurrani, L., and Tabba, S. 2013. Persepsi dan Tingkat Ketergantungan Masyarakat terhadap Sumberdaya Alam Taman Nasional Aketajawe Lolobata di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 10(1): 61–73. DOI: 10.20886/jpsek.2013.10.1.61-73
- Nurrochmat, D. R., Darusman, D., and Ekayani, M. 2016. *Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan*. Institut Pertanian Bogor (IPB) Press, Bogor.
- Ostrom, E. 1994. Constituting Social Capital and Collective Action. *Journal of Theoretical Politics* 6(4): 527–562. DOI: 10.1177/0951692894006004006
- Paramita, A., Sundawati, L., and Nurrochmat, D. R. 2018. Strategi Kebijakan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu di Zona Tradisional Taman Nasional Ujung Kulon. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan* 4(1): 1–12. DOI: 10.20957/jkebijakan.v4i1.20075
- Pranadji, T. 2016. Penguatan Modal Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering: Studi Kasus di Desa-desa (Hulu DAS) Ex Proyek Bangun Desa, Kabupaten Gunungkidul dan Ex Proyek Pertanian Lahan Kering, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Agro Ekonomi* 24(2): 178–206.
- Putnam, R. D., Leonardi, R., and Nanetti, R. Y. 1994. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Ray, S., and Bijarnia, M. 2007. Power relations and institutional outcomes: A case of pastureland development in Semi-arid Rajasthan. *Ecological Economics* 62(2): 360–372. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2006.11.017
- Rinawati, R. 2012. Modal Sosial Masyarakat Dalam Pembangunan Hutan Rakyat di Sub Das Cisadane Hulu (Kasus di areal DAS Mikro Sub DAS Cisadane Hulu). Institut Pertanian Bogor.

- Sarna, Y. N. M. S. 2014. Kadar Merkuri Rambut Anak Sekolah di Sekitar Tambang Emas Daerah Sulawesi Tengah. *e-CliniC* 2(1).
- Sartika, S. 2015. Studi Pengaruh Dampak Pembuangan Air Limbah Hasil Pengolahan Bijih Emas Terhadap Kualitas Air Sungai di Daerah Poboya, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. UPN Veteran Yogyakarta.
- Scott, J. C. 1993. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. *Pacific Affairs* 60(2): 365. DOI: 10.2307/2758183
- Suharti, S., Darusman, D., Nugroho, B., and Sundawati, L. 2016. Strengthening social capital for propelling collective action in mangrove management. *Wetlands Ecology and Management* 24(6): 683–695. DOI: 10.1007/s11273-016-9496-9
- Sulastiyono, D., Kartodihardjo, H., and Soedomo, S. 2010. Implementasi Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. *Jurnal Silviculture Tropika* Institut Pertanian Bogor 7(3): 181–187.
- Sulismadi, and Sofwani, A. 2011. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. UMM Press, Malang.
- Tishaeni, H. 2010. Keberlanjutan Komunitas Adat Kampung Cireundeu Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Institut Pertanian Bogor.
- Uphoff, N. 1999. Understanding Social Capital: Learning from Analysis and Experience of Participation. in: *Social Capital: A Multifaceted Perspective* D. Partha and I. Serageldin, eds. The World Bank, Washington D.C 249.
- Zainuddin, S., Soetarto, E., Adiwibowo, S., and Pandjaitan, N. . 2012. Kontestasi dan Konflik Memperebutkan Emas di Poboya. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 6(2): 145–159.